# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

# RENCANA STRATEGIS

# (RENSTRA) TAHUN 2024

# INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspetorat.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir. Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Tabalong yang semakin kompleks.
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2024 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2024 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong pada periode Tahun 2019 - 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan dan Perencanaan Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2014 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong

## 1.3. Maksud dan Tujuan

a. MaksuddaripembuatanRenstra SKPD adalah :

RencanaStrategisTahun 2019-2024 Inspektorat Kabupaten Tabalong disusunberdasarkandanberpedomanpadaRPJMDTahun 2019-2024PemerintahDaerah KabupatenTabalong.Maksud disusunnya Renstra Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai pedomanbagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasi lainnya.
2. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kabupaten Tabalong dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan.
3. Sebagai dasar penilaian kinerja baik serupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan

b. Tujuan Penyusunan Renstra adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahunanggaran
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Sebagaikerangkaacuanumumdalampenyusunan program kerjatahunan SKPD.
4. Sebagai instrument control danevaluasipengelolaan SKPD dalamperiode 5 tahun.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkansubstansisajiantersebut di atas, makanaskahRencanaStrategisini, disusundengansistematikasebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 MaksuddanTujuan

1.4 SistimatikaPenulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

2.1 Tugas,Fungsi dan StrukturOrganisasi Inspektorat Kabupaten Tabalong

2.2 SumberDayaInspektorat Tabalong

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong

2.4 TantangandanPeluangPengembanganPelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

3.1 IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong

3.2 TelaahanVisi, Misidan Program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 TelaahanRenstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah danKajianLingkunganHidupStrategis

3.5 PenentuanIsu-isuStrategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TujuandanSasaranJangkaMenengah Inspektorat Kabupaten Tabalong

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

## 2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabalong.

### A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong. Inspektorat Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1. Tugas Pokok

   Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasipelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah danTugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud,Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

   - Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
   - Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
   - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
   - Penyusunan laporan hasil pengawasan
   - Pelaksanaan administrasi inspektorat
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Inspektur

   Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan PemerintahanDaerah di bidang unsur pengawasan

2. Sekretariat

   Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasipelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasikepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat

   Dalam melaksanakan tugas dimaksud,Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   - Koordinasi kegiatan Inspektorat
   - Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat
   - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Inspektorat
   - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Inspektorat
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

   Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, meliputi:

   1. Sekretariat Daerah;
   2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
   3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   6. Dinas Ketahanan Pangan;
   7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
   8. Kecamatan Tanjung;
   9. Kecamatan Upau;
   10. Kecamatan Muara Uya;
   11. Kelurahan Tanjung;
   12. Kelurahan Hikun;
   13. Kelurahan Agung;
   14. Puskesmas Tanjung;

15. Puskesmas Muara Uya;
16. Puskesmas Ribang; dan
17. Puskesmas Hikun.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
c. Reviu rencana kerja anggaran;
d. Reviu laporan keuangan;
e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
h. Pemeriksaan terpadu;
i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. Penyusunan peraturan perundangan–undangan bidang pengawasan;
l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
m. Koordinasi program pengawasan;
n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dankasus pengaduan, meliputi:

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pertanian;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

9. RSUD H.Badaruddin Tanjung;
10. Kecamatan Murung Pudak;
11. Kecamatan Banua Lawas;
12. Kecamatan Bintang Ara;
13. Kelurahan Belimbing Raya;
14. Kelurahan Pembataan;
15. Kelurahan Mabuun;
16. Puskesmas Murung Pudak;
17. Puskesmas Banua Lawas;
18. Puskesmas Bintang Ara; dan
19. Puskesmas Panaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud,Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
c. Reviu rencana kerja anggaran;
d. Reviu laporan keuangan;
e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
h. Pemeriksaan terpadu;
i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. Penyusunan peraturan perundangan –undangan bidang pengawasan;
l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
m. Koordinasi program pengawasan;
n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dankasus pengaduan, meliputi:

1. Dinas Sosial;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Dinas Tenaga Kerja;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perikanan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Kecamatan Tanta;
8. Kecamatan Haruai;
9. Kecamatan Pugaan;
10. Kelurahan Belimbing;
11. Kelurahan Sulingan;
12. Puskesmas Tanta;
13. Puskesmas Haruai;
14. Puskesmas Wirang;
15. Puskesmas Pugaan; dan
16. Puskesmas Mabuun.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud,Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
c. Reviu rencana kerja anggaran;
d. Reviu laporan keuangan;
e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
h. Pemeriksaan terpadu;
i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
k. Penyusunan peraturan perundangan –undangan bidang pengawasan;

l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

m. Koordinasi program pengawasan;

n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan

p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dankasus pengaduan, meliputi:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan KB;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Kecamatan Muara Harus;
10. Kecamatan Kelua;
11. Kecamatan Jaro;
12. Kelurahan Jangkung;
13. Kelurahan Pulau;
14. Puskesmas Muara Harus;
15. Puskesmas Kelua;
16. Puskesmas Jaro;
17. Puskesmas Upau; dan
18. Puskesmas Mungkur Agung.

B. **Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di Inspektorat Kabupaten Tabalong , sesuai Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :

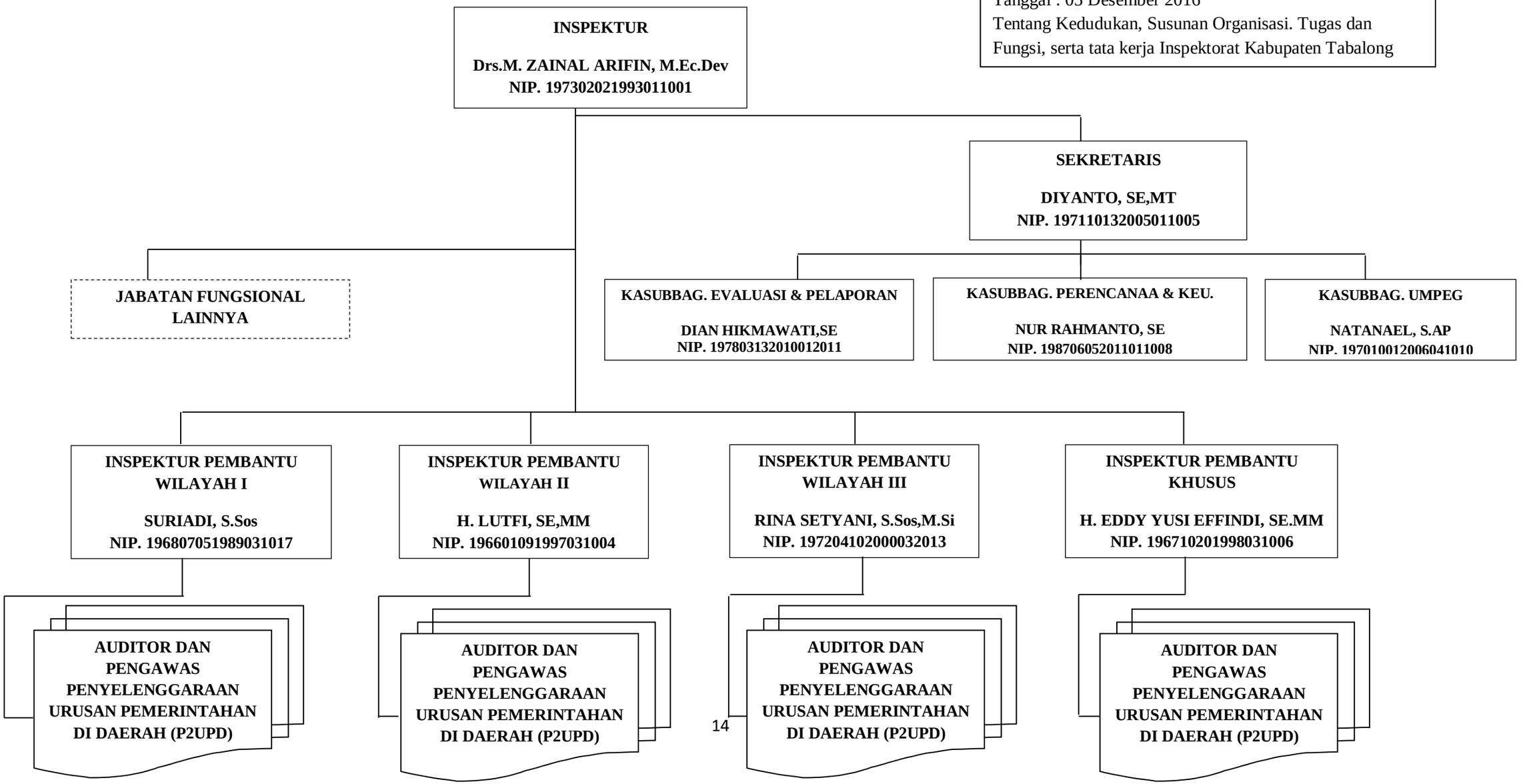
a. Sekretariat membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan& Keuangan;
    2. Subbagian Evaluasi & Pelaporan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
    1. Auditor; dan
    2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
f. Jabatan fungsional lainnya.

    Secara rinci Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabalong berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2016 digambarkan (dalam Lampiran Tabel 2.1)

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

# INSPEKTORAT TAHUN 2024

Lampiran Peraturan Perundang-undangan
Nomor : 38 Tahun 2016
Tanggal : 05 Desember 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong



## 2.2. Sumber Daya Organisasi dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tabalong

Keberadaan sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagai salah satu pendukung utama dibidang pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai latar pendidikan yang berbeda, sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai menurut golongan

| No | Jabatan | Golongan | | | | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | Inspektur | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Irban Wilayah I-IV | 2 | - | - | - | 2 |
| 3 | Kesekretariatan | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 4 | Fungsional Auditor & P2UPD | 7 | 14 | - | - | 21 |
| 5 | Staf | - | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | J u m l a h | 11 | 20 | 2 | 1 | 34 |

b. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

| No | Jabatan | Pendidikan | | | | | | jml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S1 | D III | SLTA | SLTP | SD | |
| 1 | Inspektur | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Irban Wilayah I-IV | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| 31 | Kesekretariatan | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Fungsional Auditor & P2UPD | 4 | 20 | - | - | - | - | 24 |
| 5 | Staf | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 8 |
| | J u m l a h | 8 | 28 | 2 | 3 | | | 40 |

c. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tabalong mempergunakan sarana dan prasarana antara lain :

| No. | Sarana / Prasarana | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 800 | M2 | Baik |
| 2. | KendaraanRodaEmpat | 6 | Unit | Baik |
| 3. | KendaraanRodaDua | 21 | Unit | Baik |
| 4. | MesinKetik | 3 | Buah | Baik |
| 5. | MejaPimpinan | 1 | Buah | Baik |
| 6. | LemariBesi | 15 | Buah | Baik |
| 7. | White Board | 2 | Buah | Baik |
| 8. | RakArsip | 2 | Buah | Baik |
| 9. | MesinAbsensi | 1 | Unit | KurangBaik |
| 10. | AlatUkur | 6 | Buah | Baik |
| 11. | MejaKerja | 35 | Buah | Baik |
| 12. | KursiKerja | 35 | Buah | Baik |
| 13. | KursiLipat | 40 | Buah | Baik |
| 14. | Sofa | 1 | Unit | Baik |
| 15. | KipasAngin | 2 | Buah | Baik |
| 16. | Lemari TV | 4 | Unit | Baik |
| 17. | Laptop | 22 | Buah | Baik |
| 18. | Printer | 32 | Buah | Baik |
| 19. | Komputer | 3 | Unit | Baik |
| 20. | Sound System | 2 | Unit | Baik |
| 21. | Kamera | 1 | Buah | Baik |
| 22. | TV | 5 | Buah | Baik |
| 23. | LemariBuku | 3 | Buah | Baik |
| 24. | Filling Kabinet | 6 | Buah | Baik |
| 25. | AC | 10 | Unit | Baik |
| 26. | Brand Kas | 1 | Buah | Baik |
| 27. | AlatPenghancurKertas | 3 | Buah | Baik |
| 28. | KursiTamu | 1 | Unit | Baik |
| 29. | Sofa | 1 | Unit | Baik |
| 30. | Rak TV | 1 | Buah | Baik |
| 31. | Penghisapdebu | 1 | Buah | Baik |
| 32. | LemariEs | 4 | Unit | Baik |
| 33. | Hard Disk External | 4 | Buah | Baik |
| 34. | Wireles | 1 | Buah | Baik |
| 35. | Note Book | 10 | Buah | Baik |
| 36. | Scanner | 1 | Buah | Baik |
| 37. | Proyektor | 1 | Buah | Baik |
| 38. | MesinFaxcimle | 1 | Buah | Baik |
| 39. | LayarProyektor | 1 | Buah | Baik |
| 40. | TanggaAluminium | 1 | Buah | Baik |
| 41. | Karpet | 1 | Buah | Baik |
| 42. | Dispenser | 1 | Buah | Baik |
| 43. | RakKayu | 1 | Buah | KurangBaik |
| 44. | Gordyn | 1 | Unit | Baik |

## 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong.

### A. Capaian Kinerja

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong dalam pencapaian RENSTRA dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**
**Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2018**

| No | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (7) | (8) | (9) | (20) |
| 1 | **Tingkat kepatuhan penyelesaian tindak lanjut** | | | | | 50% | 60% | 70% | 80% | | 50% | 73% | 80% | 84,9 % | | 100 % | 122 % | 114 % | 106 % | |
| 2 | **Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong** | | | | | Level 1 | Level 2 | Level 2 | Level 3 | | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Lvl 3 | | Levl 2 | Lvel 2 | Lvl 3 | Levl 3 | |
| | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase meningkatnya penyelesaian temuan kerugian daerah | Penyelenggaraan TPTGR | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 59,23 % | 100 % | 0 | 0 | | 59% | 100 % | 0 | 0 | |
| | Persentase Pelaksanaan PKPT | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala | | | | 64 PD | 64PD | 64PD | 64PD | | 56 | 42 | 42 | 26 | | 88% | 66% | 60% | 48% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan dan Penarikan Karcis | Pengelolaan dan Penarikan Karcis Yang Tidak berlaku | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 0 | 0 | 100 % | | 100 % | 0 | 0 | 100 % | |
| | Persentase Pelaksanaan Pembinaan atas Pemotongan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi | Pemotongan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 99,2 % | 0 | 0 | | | 99% | 0 | 0 | 0 | |
| | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Dana Desa. | Pengawasan non PKPT | | | | 100% | 100% | 100% | 100 | | 52,8 % | 45,3 % | 32,1 1% | 63,9 5% | | 52% | 45,3 % | 32,1 1% | 63,9 5% | |
| | Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP. | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | | | | 68 Lap | 68 Lap | 68 Lap | 68 Lap | | 40 Lap | 20 Lap | 14 Lap | 26 Lap | | 59% | 29% | 21% | 38% | |
| | Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Daerah dan Layanan Publik | Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 83,54 % | 80,1 % | 83,3 8% | 80% | | 84% | 80% | 83% | 80% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase Pelaksanaan Reviu Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Reviu LKPD | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 49,17 % | 88,9 % | 72,35% | 80% | | 49% | 89% | 72% | 80% | |
| | Level 3 | Pelaksanaan SATGAS SPIP | | | | | | 6 Lap | 6 Lap | | | | 2 Lap | 2 Lap | | | | 33% | 33% | |
| | Persentase Pengawalan yang dilakukan tim APH dan APIP terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Sinergitas Pengawalan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah | | | | | 20% | 30% | 40% | | | 30% | 30% | 40% | | | 150 % | 100 % | 100 % | |
| | Adanya Kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Daerah, POLRI dan Kejaksaan dalam rangka Pencegahan Korupsi di daerah | Koordinasi/supervisi pencegahan korupsi di daerah | | | | | | 100% | 100% | | | | 82,03% | 77,96% | | | | 82% | 77,96% | |
| | Persentase Laporan Kasus Gratifikasi | Unit Pengendali Gratifikasi | | | | | | 100% | 100% | | | | 88,29% | 96,65% | | | | 88% | 95,65% | |
| | Persentase Wajib Lapor yang | Unit LHKPN | | | | | | 60% | 70% | | | | 60% | 84,44% | | | | 100 % | 102 % | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Melaporkan harta kekayaannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Kapabilitas APIP** | | | | | Level 2 | Levl 2 | Levl 2 | Level 2 | Levl 3 | Level 2 | Levl 2 | Levl 2 | Leve l 2 | Le vl 3 | Leve l 2 | Levl 2 | Levl 2 | Levl 3 | |
| 4. | **Nilai AKIP Inspektorat** | | | | | C | CC | B | B | B | C | CC | B | BB | BB | C | CC | B | BB | |
| | Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 91,34 % | 98,4 % | 85,9 9% | 64,3 7% | | 91% | 98% | 86% | 64,3 7% | |
| | Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 43,04 | 43% | 0 | 93,2 4% | | 43% | 43% | 0 | 93,2 4% | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kondisi Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi Baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | 0 | 43,0 4 | 99,5 3% | | 100 % | 0 | 43% | 99,5 3% | |
| | Persentase tersedianya Kendaraan Operasional Layak Jalan, Tersedianya Persediaan ATK yang cukup, Terciptanya Lingkungan Kerja yang bersih dan rapi, Laporan Kepegawaian | Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor,Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | 80% | 75% | 75% | 80% | | 80% | 75% | 75% | 80% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan BMD yang selesai tepat waktu, Laporan Perencanaan yang selesai tepat waktu dan Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu. | bangunan kantor,Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, Penyediaan makanan dan minuman,Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,Penyediaan jasa keamanan kantor, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Statistik Pengetahuan Masyarakat akan tugas dan fungsi Inspektorat | Penyelenggaraan Pameran Pembangunan | | | | | 80% | 80% | 0 | | | 89,6 % | 85,11% | 0 | | | 90% | 85% | 0 | |
| | Persentase APIP yang memiliki sertifikat pengawasan | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 30 orang | | 16 orang | 29 orang | 13 orang | 26 orang | | 53% | 97% | 43% | 86% | |
| | Persentase Pelaksanaan Penilaian Penetapan Angka Kredit. | Pembinaan Perangkat Jabatan Auditor | | | | 16 orang | 16 orang | 16 orang | 16 orang | | 11 orang | 13 orang | 12 orang | 12 orang | | 69% | 81% | 75% | 75% | |

## B. Realisasi Anggaran

**Tabel 2.2**
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong**

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 5 | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Belanja Tidak Langsung | 3.525.081.000 | 3.370.460.000 | 3.483.089.000 | 3.746.900.000 | 4.755.000.000 | 2.915.623.301 | 3.017.635.873 | 3.044.836.523 | 3.840.776.784 | 2.498.584.848 | 82,7% | 89,5% | 87% | 91,9% | 40% | | |
| Belanja Langsung | 4.211.713.100 | 3.877.403.200 | 3.713.530.750 | 6.483.441.500 | 3.079.770.000 | 2.944.095.312 | 3.100.705.467 | 2.698.077.449 | 4.327.688.705 | 1.218.225.948 | 69,9% | 79% | 72,5% | 73% | 40% | | |
| Total | 7.736..794100 | 7.247.863.200 | 7.196.619.760 | 10.230.341.500 | 7.834.770.000 | 5.859.718.613 | 6.118.341.340 | 5.742.913.972 | 8.168.465.489 | 3.716.810.796 | 75.7% | 83,9% | 79,8% | 80,9% | 48% | | |

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tabalong dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran diuraikan sebagai berikut :

**A. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. **Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut**

Kegiatan dan Anggaran yang menunjang adalah :

1)Kegiatan

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Penyelenggaraan TPTGR | 34.350.000,00 |

Target capaian kinerja untuk Tahun 2018 adalah sebesar 80 %

| **Kerugian** | **Selesai** | **Sisa** | **%** |
|---|---|---|---|
| 18.595.216.705,36 | 15.797.242.613,33 | 2.797.974.092,03 | 84,95% |

Realisasi capaian kinerja sebesar untuk Tahun 2018sebesar 84,95%

2)Kegiatan

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala | 745.344.000,00 |
| 2. | Pengelolaan dan Penarikan Karcis Yang Tidak berlaku | 18.675.000,00 |
| 3. | Pengawasan non PKPT | 371.346.000,00 |
| 4. | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | 340.522.000,00 |

Pelaksanaan Pengawasan Internal pada 16 SKPD dengan hasil :

| Jml Temuan | Selesai | Dalam Proses | Blm Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 |

Rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaaan BPK RI Perwakilan Provinsi yang diterbitkan sejak Tahun 2005 s/d 2017 adalah

| Rekomendasi Temuan | Tindak Lanjut | Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 744 | 556 | 76% |

2. **Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tabalong**

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah | 537.933.000,00 |

Target Capaian Kinerja untuk Tahun 2018 adalah sebesar 80%

| No | Bulan | Aduan | Tindak Lanjut | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 16 | 10 | |
| 2 | Februari | 4 | 4 | |
| 3 | Maret | 10 | 9 | |
| 4 | April | 11 | 9 | |
| 5 | Mei | 9 | 6 | |
| 6 | Juni | 12 | 11 | |
| 7 | Juli | 10 | 7 | |
| 8 | Agustus | 8 | 6 | |
| 9 | September | 7 | 6 | |
| 10 | Oktober | 5 | 5 | |
| 11 | November | 8 | 7 | |
| 12 | Desember | 4 | 4 | |
| | **Total** | **104** | **84** | **80,7%** |

Realisasi Capaian Kinerja untuk Tahun 2018 adalah 80,7%

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Reviu LKPD | 178.996.000,00 |

pada Tahun2018 Inspektorat Tabalong telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, reviu LAKIP Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017, Reviu RKA-P Tahun Anggaran 2018 dan Reviu RKA Tahun Anggaran 2018. Inspektorat Kabupaten Tabalong juga melakukan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 yang dilaksanakan per triwulan.

Kegiatan:

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Pelaksanaan SATGAS SPIP | 126.940.000,00 |

Target capaian kinerja Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2018 adalah Level 3

Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel telah melakukanQuality Assurance terhadap Level Kematangan Implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Tabalong bersama 8 SKPD sample dan telah mencapai Kematangan Implementasi SPIP pada Level 3,9

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Sinergitas Pengawalan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah | 820.544.000,00 |

Capaian Kinerja Tim TP4D untuk Tahun 2018 adalah 40% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu melakukan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan pada 12 Kecamatan di Kabupaten Tabalong.

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Koordinasi/supervisi pencegahan korupsi di daerah | 433.115.000,00 |
| 2. | Unit Pengendali Gratifikasi | 174.518.000,00 |

Target capaian kinerja untuk indeks kesadaran penyelenggara pemerintah daerah di Tahun 2018 adalah Baik

- Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan sosialisasi dan berbagai upaya pencegahan Pungutan Liar pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan telah berhasil dengan bukti tidak adanya kejadian pungutan liar pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tabalong.
- Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan Penandatanganan Bersama Komitmen Penolakan Gratifikasi oleh Kepala Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong sehingga tidak terjadi praktek gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Unit LHKPN | 177.958.500,00 |

Target Pelaporan Harta Kekayaan oleh Penyelenggara Negara di Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2018 adalah sebesar 81%

| **Wajib Lapor** | **Sudah Lapor** | **Capaian Kinerja** |
|---|---|---|
| 135 | 114 | 84,44% |

Capaian Kinerja untuk Tahun 2018 adalah 84,44%

3. Meningkatnya Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 200.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 225.000.000,00 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 10.000.000,00 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.500.000,00 |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60.000.000,00 |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 32.534.500,00 |
| | Penyediaan alat tulis kantor | 56.798.000,00 |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 45.893.500,00 |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, | 3.900.000,00 |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 7.200.000,00 |
| | Penyediaan makanan dan minuman | 133.860.000,00 |
| | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 442.876.500,00 |
| | Penyediaan jasa keamanan kantor | 25.384.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 161.606.000,00 |

Targetcapaian kinerja untuk Tingkat Kapabilitas APIP di Tahun 2018 adalah berada pada Level 3

Hasil Quality Assurance dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah Level 3 DC

Kegiatan :

| No | Kegiatan | Anggaran Th.2018 |
|---|---|---|
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 441.704.000,00 |
| | Pembinaan Perangkat Jabatan Auditor | 30.750.000,00 |

Target capaian kinerja untuk APIP yang memiliki standar kompetensi di Tahun 2018 adalah 70%

Untuk Tahun 2018 dari 37 pegawai Inspektorat yang telah mengikuti diklat sebanyak 26 orang, sehingga tercapai sesuai target yaitu 70%

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong

Tantangan yag dihadapi Inspektorat Kabupaten Tabalong antara lain :

a. Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan pengurangan jabatan Kasubag sehingga perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi.
b. Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.
c. Keterbatasan tenaga auditor yang profesional dan berkompeten
d. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan ( obrik ) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.
e. Aturan kebijakan pengawasan yang sering berubah-ubah.

Peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah :

a. Adanya penganggaran dalam DPA Inspektorat untuk program peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat, Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk peningkatan kompetensi dan adanya Diklat pembentukan jabatan fungsional Auditor.
b. Adanya komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi dari ASN di Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.
c. Adanya Internal Audit Charter Inspektorat yang mengatur bahwa Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang diperlukan sebagaimana dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

## 3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Tabalongdan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

a. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih berorientasi pada keluaran (output) dan belum berorientasi pada hasil (outcame) maupun dampak (impact) sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong masih perlu ditingkatkan.
b. Opini atas laporan Keuangan oleh pengawas eksternal (BPK – RI ) sangat penting karena sebagai salah satu tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
c. Penerapan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong masih harus ditingkatkan , hal ini dikarenakan belum seluruhnya Perangkat Daerah membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Resiko dan sebagainya terutama terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat.
d. Masih tinggi/ banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal.
e. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK RI masih belum optimal

## 3.2. TelaahanVisi, Misidan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### A. Visi Kabupaten Tabalong

Visi kabupaten Tabalong periode 2015 – 2019 adalah " Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri" Berdasarkan visi daerah yang merupakan visi kepala daerah danwakil kepala daerah terpilih ini, secara umum terkandung pemahaman yakni :

1. Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis

   Merupakan pendekatan membumi melalui pembiasaan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai agama pada kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah untuk hidup lebih agamis dan modern dalam tatanan sosial kemasyarakatan serta produktif dan bermanfaat dalam bekerja. Nilai nilai agama yang seharusnya mendapat perhatian tersebut seperti kejujuran, kedisiplinan, musyawarah, keikhlasan, kemandirian, profesionalisme, keadilan, amanah, kebersamaan/persatuan,aspiratif/akomodatif, tawakal dan lain-lain.

2. Kabupaten Tabalong Yang Lebih Sejahtera

   Merupakan pendekatan lahiriah untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampumemenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin dengan rasa aman dan nyaman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, makmur, sehat dan damai,

3. Kabupaten Tabalong Yang Lebih Mandiri

   Merupakan pendekatan kelembagaan dan profesionalitas dalam perkuatan sistem ekonomi, sosial dan budaya yang handal dan dinamis serta mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah dihadapi secara lebih bijak dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya manusia yang dioptimalkan, pemanfaatan sumber daya alam lokal, dan pemberdayaan lembaga ekonomi yang ada melalui kerja keras dan inovatif.

## B. Misi Kabupaten Tabalong

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka dibuat misi pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamis
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah

Peran Inspektorat Kabupaten Tabalong dalam membantu mewujudkan visi tersebut berkaitan dengan misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kemandirian Daerah dan sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik dengan membangun dan mengembangkan potensi sumberdaya melalui sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Kepatuhan Pen
2. 
3. yelesaian Tindak LanjutEksternal & Internal
4. Meningkatnya Maturitas SPIP Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Entitas
6. Mewujujudkan Zona Integritas dengan predikat WBK
7. Meningkatnya Kapabilitas APIP

**Tabel 3.2**

**Hubungan Visi Misi & Sasaran Kepala Daerah dengan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabalong**

| No | Visi Kabupaten | Misi ke 3 | Sasaran ke 4 | Sasaran Inspektorat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri | Mewujudkan Kemandirian Daerah | Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik | 1. Meningkatnya Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Eksternal & Internal<br>2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah |

## 3.3. TelaahanRenstra K/L danRenstra Inspektorat Propinsi Kalsel

### A. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 maka visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Visi : ***"Menjadi unit audit yang profesional dan berintegritas untuk wujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara".***

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Inspektorat Jenderal yaitu ;

a. Tata Kelola; mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
b. Efisiensi dan Efektivitas; mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan
c. Kepatuhan; mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
d. Akuntabilitas; mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
e. Pelayanan; mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
f. Integritas; mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

Dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuannya, Inspektorat Jenderal telah menetapkan 9 sasaran strategis (SS) yaitu

1. Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif
2. Kepuasan pemangku kepentingan yang tinggi
3. Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif
4. Implementasi pengawasan yang berkualitas
5. Komunikasi pengawasan yang efektif
6. Sumber Daya Manusia yang kompetitif
7. Organisasi yang kondusif
8. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
9. Pelaksanaan anggaran yang optimal

**B. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi KalSel**

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021 adalah **"Mewujudkan Peran Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

**3.4. TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidupStrategis**

Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Tabalong, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dankegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawas, makaprogram dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkaitlangsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRWdan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalampelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat salingmelengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadibagian evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tabalong.

**3.5. PenentuanIsu-isuStrategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L,Renstra Propinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagai berikut :"***Adanya Mandatory dari KPK Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem"***

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misidaerah yang dirumuskan secara implementatif, dan menjadi acuan dalammerumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaranjuga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangkamenengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RencanaStrategis Inspektorat Kabupaten Tabalong secara keseluruhan. Tujuandan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerahyang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas InspektoratKabupaten Tabalong. Perumusan tujuan dan sasaran, selainmenerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunandaerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaianindikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tabalong lima tahun kedepan 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

**a. Tujuan**

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :***Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien***

**b. Sasaran**

Sasaranadalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih terarah, terperinci dan operasional. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kepatuhan Penyelesaian Tindak LanjutEksternal & Internal
2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tabalong**

**Visi Kabupaten Tabalong : Menuju Kabupaten Tabalong Yang Lebih Agamis Sejahtera dan Mandiri**

| No | TUJUAN | | | SASARAN | | | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kondisi Awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN | INDIKATOR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien | Meningkatnya Maturitas SPIP perangkat daerah | | Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut:<br>- eksternal<br>- internal | <br>- Persentase tindak lanjut eksternal<br>- Persentase tindak lanjut internal | <br>80%<br>85% | <br>80%<br>85% | <br>80%<br>85% | <br>85%<br>88% | <br>92%<br>92% | <br>98%<br>98% |
| | | | | Meningkatnya Maturitas SPIP perangkat daerah | Persentase muturitas SPIP perangkat daerah level 3 | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja entitas | Persentase laporan kinerja dan keuangan entitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Mewujudkan zona itegritas dengan predikat WBK | Jumlah perangkat daerah dengan predikat WBK | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 5 PD |
| | | | | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level kapabilias APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah perumusan Tujuan dan Sasaran untuk mendukung perwujudan Visidan Misi daerah, Inspektorat Kabupaten Tabalong perlu merumuskanStrategi dan Arah Kebijakan yang menjadi bagian dari tersusunnya RencanaStrategis Inspektorat Kabupaten Tabalong pada periode 2019 – 2024.Strategi sebagaimana "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah". Jadi dapatdikatakan bahwa strategi adalah cara atau langkah-langkah yang di dalamnyaterdapat program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih.Adapun kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh InspektoratKabupaten Tabalong untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.Perumusan strategi dijabarkan secara umum terhadap capaian pembangunan yangbersifat makro, sedangkan dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dilakukan melalui strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masingmisi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah :

1. Peningkatan kegiatan pelaksanaan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas temuan eksternal dan internal
2. Peningkatan Pengawasan pembinaan SPIP pada Perangkat daerah
3. Meningkatkan pengawasan atas akuntabilitas kinerja entitas di kabupaten Tabalong
4. Meningkatkan pembinaan zona integritas pada perangkat daerah
5. Meningkatkan profesionalitas APIP pada Inspektorat Tabalong

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan yang akan ditempuh Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah dan disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISI : Mewujudkan Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri | | | | | | |
| MISI 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah | | | | | | |
| Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik | | | | | | |
| **Tujuan** | | **Sasaran** | | **Strategi** | | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien | 1. | Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut:<br>- Eksternal<br>- internal | 1 | Peningkatan kegiatan pelaksanaan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas temuan eksternal dan internal | 1 | Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal (pengawasan melekat, pengawasan fungsional), eksternal dan pengawasan masyarakat. |
| | 2. | Meningkatnya system pengendalian internal Pemerintah Daerah | 2 | Peningkatan Pengawasan pembinaan SPIP pada Perangkat daerah | 2 | Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pembinaan dan Pengawasan SPIP |
| | | | 3 | Meningkatkan pengawasan atas akuntabilitas kinerja entitas di kabupaten Tabalong | 3 | Meningkatkan pengawasan atas kinerja serta kualitas pelayanan publik |
| | | | 4 | Meningkatkan pembinaan zona integritas pada perangkat daerah | 4 | Menetapkan perangkat daerah sebagi wilayah zona integritas menuju WBK WBBM |
| | | | 5. | Meningkatkan profesionalitas APIP pada Inspektorat Tabalong | 5. | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawas |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dansasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahuicapaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagaikumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yangdilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dankegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yangdihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan Inpektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG**

| TUJUAN | SASARAN | Kode | Program & Kegiatan | INDIKATOR Tujuan,Sasaran,Program (output), Kegiatan (outcome) | Data Capaian Pada Awal Perenc. | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien** | **Meningkatnya system pengendalian internal pemerintah daerah** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **BB** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen** | **9 Dokumen** | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah & Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen | 11 Dokumen | | | | | 9,750,000 | 9 Dok | 10,725,000 | 9 Dok | 11,797,500 | 9 Dok | Inspektorat |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 9 Dokumen | | | | | 15,250,000 | 100% | 16,775,000 | 100% | 18,452,500 | 100% | Inspektorat |
| | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Gaji Dan Tunjangan** | **14 Bulan** | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tnjangan ASN | 100% | | | | | 4,585,000,000 | 100% | 5,043,500,000 | 100% | 5,547,850,000 | 100% | Inspektorat |
| | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kapabilitas APIP** | **3 Level** | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan pelatihan formal | 39 | | | | | 450,000,000 | 39 orang | 495,000,000 | 40 orang | 544,500,000 | 42 orang | Inspektorat |
| | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Nilai IKM** | **74%** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Penerangan bangunan kantor yang terpenuhi | 74% | | | | | 4,000,000 | 74% | 4,400,000 | 74% | 4,840,000 | 74% | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli | 7 Macam | | | | | 200,000,000 | 7 macam | 220,000,000 | 7 macam | 242,000,000 | 7 macam | Inspektorat |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan | 8 macam | | | | | 35,000,000 | 8 macam | 38,500,000 | 8 macam | 42,350,000 | 8 macam | Inspektorat |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bacaan dan Iklan yang terpenuhi setiap bulan | 2 Macam | | | | | 6,000,000 | 74% | 6,600,000 | 74% | 7,260,000 | 74% | Inspektorat |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | 180 kegiatan | | | | | 453,000,000 | 180 keg | 498,300,000 | 180 keg | 548,130,000 | 180 keg | Inspektorat |
| | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Nilai IKM** | **74%** | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah benda pos yang tersedia | 7 macam | | | | | 6,000,000 | 74% | 6,600,000 | 74% | 7,260,000 | 74% | Inspektorat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik | Jumlah rekening listrik, air dan telpon yang terbayar | 12 Bulan | | | | | 75,000,000 | 74% | 82,500,000 | 74% | 90,750,000 | 74% | Inspektorat |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor | 13 Bulan | | | | | 387,974,000 | 13 bulan | 426,771,400 | 13 bulan | 469,448,540 | 13 bulan | Inspektorat |
| | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | **Jumlah Alat dan** | 5 macam | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Daerah** | **Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan** | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 74% | | | | | 200,000,000 | 74% | 220,000,000 | 74% | 242,000,000 | 74% | Inspektorat |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan | 5 macam | | | | | 28,100,000 | 5 macam | 30,910,000 | 5 macam | 34,001,000 | 5 macam | Inspektorat |
| | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH** | **Tingkat Muturits SPIP Kab. Tabalong** | 50% | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya system pengendalian internal pemerintah daerah** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Persentase Jumlah kegiatan Pengawasan Internal** | **100%** | | | | | | | | | | | |
| | | | Reviu Laporan Kinerja | Persentase Reviu | 100 % | | | | | 75,200,000 | 45 Lap | 82,720,000 | 45 Lap | 90,992,000 | 45 Lap | Inspektorat |
| | | | Reviu Lap Keuangan | Persentase reviu | 100% | | | | | 213,840,000 | 1 lap | 235,224,000 | 1 lap | 258,746,400 | 1 lap | Inspektorat |
| | | | Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Pengawasan Kinerja | 100% | | | | | 272,330,500 | 5 | 299,563,550 | 5 | 329,519,905 | 5 | Inspektorat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawasan Desa | Persentase ATT Desa | 100% | | | | | 300,000,000 | 17 | 330,000,000 | 17 | 363,000,000 | 17 | Inspektorat |
| | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Persentase Audit Kinerja | 100% | | | | | 85,000,000 | 1 | 93,500,000 | 1 | 102,850,000 | 1 | Inspektorat |
| | **Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut Eksternal dan Internal** | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase Monitoring dan Evaluasi | 100% | | | | | 450,300,000 | 1 | 495,330,000 | 1 | 544,863,000 | 1 | Inspektorat |
| | | | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Persentase Jumlah kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP dan BPK RI | 93% | | | | | 219,000,000 | 100% | 240,900,000 | 100% | 264,990,000 | 100% | Inspektorat |
| | | | Penawasan Dengan Tujuan Tertentu | Peserntase ATT SKPD | 100% | | | | | 416,250,000 | 33 lap | 457,875,000 | 33 lap | 503,662,500 | 33 lap | Inspektorat |
| | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Jumlah perangkat daerah dengan predikat WBK | 3 PD | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya system pengendalian internal pemerintah daerah** | | **Pendampingan dan Asistensi** | Persentase Implementasi<br><br>Rencana Aksi Pencegahan Korupsi pada 8 Area Intervensi | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | - Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKASN '- | 86% | | | | | 306,596,500 | 86% | 337,256,150 | 90% | 370,981,765 | 95% | Inspektorat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN | 96% | | | | | | 96% | - | 98% | - | 100% | Inspektorat |
| | | | | '- Persentase Pelaksanaan Pengendalian gratifikasi | 100% | | | | | | 100% | - | 100% | - | 100% | Inspektorat |
| | | | Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 'Persentase Dumas yang ditindaklanjuti | 100% | | | | | 1,271,040,000 | 100% | 1,398,144,000 | 100% | 1,537,958,400 | 100% | Inspektorat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | - Persentasi ZI unit Pelayanan Publik | **20%** | | | | | 953,343,000 | 50% | 1,048,677,300 | 75% | 1,153,545,030 | 100% | Inspektorat |

# BABVII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabalong yang merupakan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong. Adapun keterkaitan indikator kinerja Inspektorat Tabalong dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD adalah mengacu atau mendukung untuk pencapaian misi ke 3 dari RPJMD seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 7.1**

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tabalong 2019-2024**

**Misi ke 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capain Setiap Tahun | | | | | Kondisi akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel | Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik. | | Indeks Reformasi Birokrasi | 59 | 67 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| | | | a | Nilai SAKIP (predikat) | B | B | B | BB | BB | A | A |
| | | | b | Opini BPK (predikat) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sehubungan hal diatas, indikator kinerja yang dibuat oleh Inspektorat menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabalong Mengacu Pada RPJMD**

**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien | Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut :<br>- eksternal<br>- internal | - Persentase tindak lanjut eksternal<br>- Persentase tindak lanjut internal | 80%<br>85% | 80%<br>85% | 80%<br>85% | 85%<br>88% | 92%<br>92% | 98%<br>98% | 80%<br>85% |
| 2. | | Meningkatnya Sistem Pengenadalian Pemerintah Daerah | Persentase muturitas SPIP perangkat daerah level 3 | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 50% |
| | | | Persentase laporan kinerja dan keuangan entitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Jumlah perangkat daerah dengan predikat WBK | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 3 PD | 5 PD | 3 PD |
| | | | Level kapabilias APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

# BAB VIII
# PENUTUP

Renstra Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD KabupatenKabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencanatindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapaiselama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harusdiimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuandan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan kompetensi sumber dayaaparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat, penyusunan Renstra diharapkanmampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkunganstrategis baik di intern Inspektorat maupun di lingkup pemerintahan daerah.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan,yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerjatahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan memohon Ridha Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabalong dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Tanjung, Februari 2024

INSPEKTUR,

Drs. Mochammad Zainal Arifin, M.Ec,Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 196206061985031022